



ANALISIS PENGARUH *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* DENGAN DIMODERASI *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

Levi Martantina^{1a}, R. Soerjatno^{2b}

^{1,2}Dosen Prodi Perpajakan, Politeknik Ubaya, Surabaya
E-mail: martantinal Levi@yahoo.co.id^a, soerjatno.rd@gmail.com^b

Abstract

This study aims to examine the effect of Corporate Social Responsibility on Tax Avoidance in which Good Corporate Governance is moderating variable. Corporate Social Responsibility is independent variable whereas dependent variable is Tax Avoidance. The result of testing the first hypothesis found that Corporate Social Responsibility has a negative effect on Tax Avoidance. In other words, the company that does extensive disclosure, the company does not practice Tax Avoidance. The result of testing the second hypothesis found that the existence of Good Corporate Governance in the board of directors mediate the influence of Corporate Social Responsibility with Tax Avoidance. So that the existence of the board of directors is able to contribute in making extensive disclosure towards Corporate Social Responsibility and practice of Tax Avoidance.

Keywords: *Corporate Social Responsibility, Good Corporate Governance, Tax Avoidance.*

Pendahuluan

Latar Belakang

Didirikannya suatu perusahaan dengan maksud dan tujuan untuk memaksimalkan laba atau keuntungan (Warren, 2005:2). Maksud dan tujuan itu dapat tercapai apabila perusahaan menerapkan suatu pengelolaan perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Salah satu implementasi dalam konsep *Good Corporate Governance* adalah adanya *Corporate Social Responsibility*. Alasan yang mendasari perusahaan untuk melakukan aktivitas *Corporate Social Responsibility* adalah sebagai strategi perusahaan, misalnya untuk meningkatkan reputasi dan citra perusahaan, untuk menghindari tekanan dari masyarakat, atau karena perusahaan benar-benar merasa bertanggung jawab terhadap masyarakat (Sedyono, 2006).

Perseroan dalam menjalankan usaha selain berkewajiban dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, juga mempunyai kewajiban dalam perpajakan. Suatu negara dikatakan mandiri apabila dapat meningkatkan peran serta aktif seluruh masyarakat termasuk perusahaan melalui pembayaran pajak dan melaporkan kewajiban perpajakannya berdasarkan dengan waktu yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, upaya dalam meningkatkan kesadaran dalam tertib pembayaran dan pelaporan pajak masih terhambat oleh beberapa kendala dalam hal upaya penghindaran pajak, sehingga mengakibatkan berkurangnya pendapatan negara dari sektor perpajakan. Berkaitan dengan hal tersebut, perusahaan mempunyai kewajiban ganda, yaitu perusahaan harus menganggarkan dana untuk *Corporate Social Responsibility* dan untuk membayar pajak. Dengan adanya kewajiban ganda tersebut, mengakibatkan perusahaan semakin agresif dalam perpajakan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, rumusan masalah yang dapat dirincikan sebagai berikut:

- a. Apakah *Corporate Social Responsibility* memengaruhi *Tax Avoidance*?
- b. Apakah *Good Corporate Governance* mampu memengaruhi *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance*?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini dilakukan adalah:

- a. untuk menguji sejauh mana *Corporate Social Responsibility* dapat memengaruhi *Tax Avoidance*;
- b. untuk menguji kemampuan *Good Corporate Governance* dalam memengaruhi *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance*.

Tinjauan Pustaka

Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Putri, Zaitul, dan Herawati (2014) menyatakan bahwa *Corporate Social Responsibility* berpengaruh secara signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini diduga karena tingginya tingkat kesadaran dari perusahaan akan pentingnya pengungkapan informasi sosial perusahaan. Tindakan pengungkapan informasi sosial perusahaan dapat dijadikan sebagai strategi guna menghasilkan nilai tambah bagi perusahaan. Sedangkan untuk *Good Corporate Governace* yang diproksikan dalam kepemilikan institusional, komposisi dewan komisaris independen, komite audit, kualitas audit menyatakan bahwa tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Penelitian Winarsih, Prasetyono, dan Kusufi (2014) mengungkapkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif perusahaan, dikarenakan adanya kesulitan dalam hal berkoordinasi antaranggota dewan komisaris, sehingga akan menghambat proses *controlling* yang memang seharusnya menjadi tanggung jawab dari dewan komisaris. Untuk ukuran dewan direksi, komite audit dan *Corporate Social Responsibility* tidak berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif perusahaan.

Di dalam penelitiannya, Maesarah, Atikah, dan Husnaini (2014) menyatakan bahwa dari 33 perusahaan manufaktur yang telah diseleksi adanya ukuran perusahaan, *leverage*, *capital intensity*, *inventory intensity* dan *Corporate Social Responsibility* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini ditunjukkan bahwa setiap item pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

Landasan Teori

Agresivitas Pajak

Menurut Frank (2009) dalam Mustika, Zaitul, dan Yumilna (2013) yang disebut dengan pajak agresif adalah tindakan untuk menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak baik dengan dengan cara tergolong maupun tidak tergolong *Tax Evasion*. Hite dan McGill (1992) dan Murphy (2004) dalam Martani dan Sari (2010) menyatakan bahwa suatu agresivitas pelaporan pajak adalah situasi ketika perusahaan melakukan kebijakan pajak tertentu dan suatu hari terdapat kemungkinan tindakan pajak tersebut tidak akan diaudit atau dipermasalahkan dari sisi hukum, namun tindakan ini beresiko karena ketidakjelasan posisi akhir (apakah tindakan pajak tersebut dianggap melanggar atau tidak melanggar hukum yang berlaku).

Sejalan penelitian yang dilakukan di luar, Zemzem dan Ftouhi (2013) menyatakan bahwa tindakan pajak agresif dapat dilihat dalam 2 (dua) cara, yang pertama yaitu secara legal yaitu melalui *Tax Avoidance* yang sering diberikan oleh akuntan dalam salah satu jasa yang diberikan. Yang kedua yaitu adanya *Tax Sheltering* yang kemukakan oleh Yeung (2010).

Corporate Social Responsibility

Salah satu prinsip *Good Corporate Governance* adalah *responsibility*. Di dalam prinsip *responsibility* lebih ditekankan pada pemberian kepentingan dari *stakeholders* perusahaan, di mana *stakeholders* merupakan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. Prinsip *responsibility* dalam *Good Corporate Governance* melahirkan gagasan *Corporate Social Responsibility*, di mana tanggung jawab perusahaan tidak hanya pada *corporate value* akan tetapi berpijak dalam tanggung jawab sosial dan lingkungan. Beberapa definisi *Corporate Social Responsibility* yang telah dikenal merupakan upaya manajemen yang dijalankan oleh entitas bisnis untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan berdasarkan pada keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan, dengan meminimumkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif tiap pilar (Prayogo; 2007).

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, perusahaan akan mempunyai kewajiban ganda, di samping perusahaan harus mengeluarkan dana untuk *Corporate Social Responsibility* dan perusahaan wajib untuk melakukan pembayaran pajak. Atas kewajiban ganda tersebut perusahaan cenderung untuk melakukan strategi dalam menyiasati pembayaran pajak dengan mencari celah atau kelemahan-kelemahan peraturan perpajakan. Hubungan antara *Corporate Social Responsibility* dengan agresivitas pajak ini telah banyak dilakukan. Menurut Lanis dan Richardson (2012) dalam Putri, Zaitul, dan Herawati (2014), semakin tinggi tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility* atas suatu perusahaan, semakin rendah tingkat agresivitas pajak perusahaan tersebut. Sedangkan menurut Huseynov dan Klann (2012) dalam Putri, Zaitul, dan Herawati (2014) mengungkapkan bahwa *Corporate Social Responsibility* mempengaruhi penghindaran pajak ketika sebuah perusahaan dibagi menjadi portofolio berdasarkan tingkat *Corporate Social Responsibility*.

Tax Avoidance

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat diartikan sebagai penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dengan memanfaatkan celah (*loopholes*) yang terdapat dalam peraturan perpajakan yang ada untuk mneghindari pembayaran pajak, atau melakukan transaksi yang tidak memiliki tujuan selain untuk menghindari pajak (Wijaya: 2014). Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Darussalam dan Septriadi (2009) bahwa *Tax Avoidance*

dapat diartikan sebagai suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*loopholes*) ketentuan perpajakan suatu negara, sehingga para ahli pajak menyatakan sah-sah saja (legal) karena tidak melanggar ketentuan perpajakan.

Di dalam penelitian ini *Tax Avoidance* yang diukur menggunakan perhitungan CASH ETR (*cash effective rate*) perusahaan, yaitu kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak (Dyrenge et al., 2010). Di dalam CASH ETR menunjukkan bahwa semakin besar CASH ETR, maka akan semakin rendah tingkat penghindaran pajak suatu perusahaan.

$$\text{CASH ETR} = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Good Corporate Governance

Good Corporate Governance (GCG) menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) adalah satu pilar dari sistem ekonomi pasar. *Corporate Governance* didefinisikan oleh Monk dan Minov dalam Darmawati (2005) sebagai hubungan partisipasi dalam menentukan arah dan kinerja. *Corporate Governance* didefinisikan oleh IICG (*Indonesian Institute of Corporate Governance*) sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama untuk meningkatkan nilai pemegang saham (*stockholders*) dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* yang lain.

Pemenuhan kepentingan seluruh *stakeholders* secara seimbang berdasarkan peran dan fungsinya masing-masing dalam suatu perusahaan, merupakan tujuan utama yang hendak dicapai. Prinsip-prinsip utama dari *Good Corporate Governance* yang menjadi indikator, sebagaimana ditawarkan oleh *Organization for Economic and Development* (OECD) adalah: *Fairness* (Keadilan); *Disclosure/Transparency* (Keterbukaan/Transparansi); *Accountability* (Akuntabilitas); *Responsibility* (Responsibilitas/Pertanggungjawaban); *Independency* (Independen).

Inti dari kebijakan tata kelola perusahaan adalah agar pihak-pihak yang berperan dalam menjalankan perusahaan memahami dan menjalankan fungsi dan peran sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. Pihak-pihak yang berperan dalam kinerja perusahaan meliputi :

a. Pemegang Saham

Pemegang saham merupakan pemilik modal, di mana pemegang saham tersebut memiliki hak dan tanggung jawab atas perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan. Dengan kata lain bahwa di dalam melaksanakan hak dan tanggung jawabnya, pemegang saham harus memperhatikan kelangsungan hidup perusahaan.

b. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memegang peranan yang sangat penting dalam perusahaan, terutama dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance*, yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan,

serta mewajibkan terlaksannya akuntabilitas. Berdasarkan ketentuan dari BEI bahwa tingkat independensi dewan komisaris, mengharuskan perusahaan publik memiliki 30% komisaris independen dari seluruh jumlah komisaris di dalam suatu perusahaan.

c. Komite

Di dalam *Corporate Governance* terdapat tiga komite yang memiliki peranan penting, yaitu: Komite Kompensasi/ Remunerasi; Komite Nominasi; Komite Audit. Salah satu dari komite-komite yang telah disebutkan di atas yaitu Komite Audit memiliki tugas terpisah dalam membantu Dewan Komisaris untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam memberikan pengawasan secara menyeluruh. Komite Audit beranggotakan Komisaris Independen, dan terlepas dari kegiatan manajemen sehari-hari dan mempunyai tanggung jawab utama untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tanggung jawabnya terutama dengan masalah yang berhubungan dengan kebijakan akuntansi perusahaan, pengawasan internal, dan sistem pelaporan keuangan (www.cic-fcgi.org).

Jumlah anggota Komite Audit disesuaikan besar kecilnya dengan organisasi dan tanggung jawab. Namun biasanya 3 (tiga) sampai 5 (lima) anggota merupakan jumlah yang cukup ideal. Komite Audit biasanya perlu untuk mengadakan rapat 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali setahun untuk melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya yang menyangkut soal sistem pelaporan keuangan.

d. Dewan Direksi

Pejabat yang ditunjuk pemegang saham untuk mengelola perusahaan serta wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemilik modal/ pemegang saham. Selain juga mengelola dan mewakili perusahaan di bawah pengarahan dan pengawasan Dewan Komisaris. Fungsi pengelolaan perusahaan oleh Direksi mencakup 4 (empat) tugas utama yaitu kepengurusan, manajemen risiko, pengendalian internal, tanggung jawab sosial. Dalam melakukan Tanggung Jawab Sosial, tugas Dewan Direksi adalah dalam rangka mempertahankan kesinambungan usaha perusahaan, Direksi harus dapat memastikan dipenuhinya tanggung jawab sosial perusahaan; dan Direksi harus mempunyai perencanaan tertulis yang jelas dan fokus dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (www.cic-fcgi.org).

e. Pimpinan Unit

Pimpinan unit adalah pejabat yang ditunjuk pimpinan perusahaan sebagai penanggung jawab pelaksanaan operasional perusahaan.

a. Karyawan

Yang dikategorikan karyawan adalah orang-orang yang bekerja pada perusahaan dan melakukan semua kegiatan operasional perusahaan, serta menerima gaji berdasarkan hubungan kerja.

Dari penjelasan di atas, pada dasarnya *Corporate Governance* tersebut mempunyai kepentingan dalam suatu perusahaan baik kepada pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan khususnya yaitu para investor dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip utama dari *Good Corporate Governance* yang menjadi indikator, sebagaimana ditawarkan oleh *Organization for Economic and Development* (OECD).

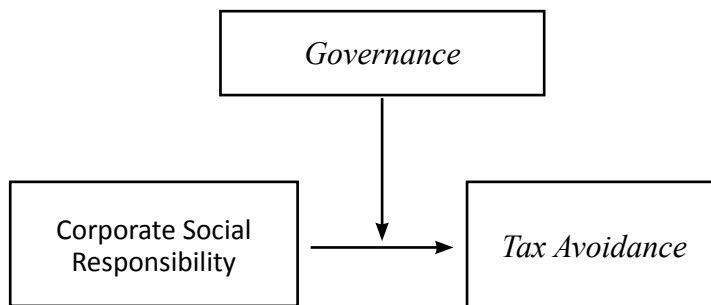
Berbagai penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan *Good Corporate Governance*. Penelitian Putri, Zaitul, Herawati (2014) menyatakan bahwa *Good Corporate Governance*

yang diproksikan dalam kepemilikan institusional, komposisi dewan komisaris independen, komite audit, kualitas audit menyatakan bahwa tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Winarsih, Prasetyono, Kusufi (2014) menyatakan bahwa ketiga proksi dari *Good Corporate Governance* yaitu Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan Komite Audit tidak berpengaruh pada tindakan pajak agresif. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Zemzem dan Ftouhi (2013) terhadap 73 perusahaan selama 2006-2010 menyatakan bahwa perbedaan dan ukuran dewan direksi dapat menurunkan tindakan pajak agresif.

Metode Penelitian

Rerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, kerangka konseptual yang dapat dibentuk dalam penelitian ini sebagai berikut.



Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian

Hipotesis

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan kerangka teoritis yang disajikan di atas, hipotesis yang dapat dibentuk sebagai berikut:

- H1 : Diduga dalam menerapkan *Corporate Social Responsibility* akan dapat mempengaruhi *Tax Avoidance*.
- H2 : Diduga bahwa kemampuan *Good Corporate Governance* dapat mempengaruhi *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance*.

Jenis Penelitian

Berdasarkan bab sebelumnya, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, di mana diorientasikan untuk melihat hubungan variabel, menguji teori, dan mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif. Di dalam penelitian ini mencoba untuk menginterpretasikan fenomena mengenai pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance* dengan *Good Corporate Governance* sebagai variabel moderating.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan manufaktur dan pertambangan yang terdaftar di BEI untuk tahun 2014. Berdasarkan Indonesian Capital Market Directory perusahaan yang terdapat di BEI selama tahun 2014.

Sampel dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Adapun kriteria sampel berdasarkan metode *purposive sampling* yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Perusahaan manufaktur dan pertambangan yang terdaftar di BEI untuk tahun 2014;
- b. Menerbitkan *Annual Report* tahun 2014;
- c. Menerbitkan *Sustainability Reporting* (laporan berkelanjutan) atau informasi sosial lainnya tahun 2014;
- d. Memiliki data yang lengkap terkait dengan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian.

Variabel Penelitian

Berdasarkan penjelasan dari bab-bab sebelumnya, di dalam penelitian ini, variabel-variabel yang digunakan sebagai berikut:

a. Variabel Independen

Variabel independence dalam penelitian ini adalah *Corporate Social Responsibility* dengan menggunakan indikator GRI yang meliputi kemasyarakatan, ketenagakerjaan, produk dan konsumen, dan lingkungan hidup. *Corporate Social Responsibility* diukur dengan menggunakan variabel dummy, yaitu:

Nilai 0 = jika perusahaan tidak mengungkapkan item pada daftar pertanyaan.

Nilai 1 = jika perusahaan mengungkapkan item pada daftar pertanyaan.

b. Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *Tax Avoidance* yang diukur menggunakan perhitungan CASH ETR (*cash effective rate*) perusahaan, yaitu kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak (Dyreng at al., 2010). Di dalam CASH ETR menunjukkan bahwa semakin rendah tingkat penghindaran pajak suatu perusahaan.

$$\text{CASH ETR} = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

c. Variabel Moderating

Variabel moderating yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepemilikan manajemen, dewan komisaris, dewan direksi, dan komite audit sebagai proksi GCG. Di dalam penelitian ini, proksi dari GCG yang terdiri dari kepemilikan manajemen, dewan komisaris, dewan direksi, dan komite audit, diukur dengan :

- 1) Kepemilikan manajemen di ukur dengan menggunakan natural logaritma, yaitu :

$$\text{Natural Logaritma} = \frac{\% \text{ saham yang dimiliki oleh} \\ \text{manajer, dewan direksi, dewan} \\ \text{komisaris}}{\text{Total jumlah saham} \\ \text{yang beredar}}$$

2) Dewan Komisaris

Pengukuran dewan komisaris di dalam penelitian ini adalah proporsi jumlah anggota dewan komisaris. Berdasarkan ketentuan dari BEI bahwa tingkat independensi dewan komisaris, mengharuskan perusahaan publik memiliki 30% komisaris independen dari seluruh jumlah komisaris di dalam suatu perusahaan. Penelitian ini menggunakan variabel *dummy* yaitu :

Nilai 1 = jika perusahaan memiliki susunan komisaris independen sesuai dengan peraturan BEJ.

Nilai 0 = jika perusahaan tidak memiliki susunan dewan komisaris independen sesuai dengan peraturan BEJ.

3) Komite Audit

Pengukuran komite audit di dalam penelitian ini adalah jumlah anggota komite audit dalam perusahaan. Jumlah optimal anggota komite audit tergantung pada masing-masing perusahaan, dan umumnya terdiri dari 3 atau 4 anggota yang diambil dari dewan komisaris, bukan dari dewan direksi agar objektivitasnya terjaga. Jumlah optimum yang disarankan adalah antara 3-6 orang (www.cic-fcgi.org).

Nilai 1 = jika perusahaan memiliki susunan komite audit sesuai dengan peraturan BEJ.

Nilai 0 = jika perusahaan tidak memiliki susunan komite audit sesuai dengan peraturan BEJ.

4) Dewan Direksi

Pengukuran dewan direksi di dalam penelitian ini adalah jumlah anggota dewan direksi, dimana jumlah dewan direksi disesuaikan dengan perusahaan sehingga memungkinkan dalam pengambilan keputusan secara efektif, tepat, dan cepat, serta dapat bertindak secara independen.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Tahunan perusahaan yang terdaftar di BEI untuk periode 2014 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, menerbitkan laporan keberlanjutan (*sustainability reporting*) atau informasi sosial lainnya.

Prosedur Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini, prosedur pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara menelusuri laporan tahunan perusahaan dan laporan keberlanjutan atau informasi sosial

perusahaan yang terpilih menjadi sampel. Setelah itu dilakukan *check list* atau membuat daftar pertanyaan yang berisi item-item pengungkapan tanggung jawab sosial.

Metode Analisis Data

Di dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan dapat dirincikan sebagai berikut:

a. Metode Uji Asumsi Klasik

Metode uji asumsi klasik merupakan persyaratan yang harus dipenuhi pada analisis regresi berganda. Dalam penelitian ini, uji asumsi klasik yang dilakukan adalah normalitas, multikolinearitas, heterokedastisitas. Penggunaan uji asumsi klasik di dalam penelitian dijelaskan sebagai berikut:

1) Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan pada nilai residualnya. Hal ini dikarenakan uji normalitas merupakan suatu pengujian yang dilakukan untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Di dalam penelitian ini, pengujian normalitas data dilakukan dengan menggunakan *one sample kosmogorov-smirnov test*, dengan melihat tingkat signifikan 5%. Dasar keputusannya adalah dengan melihat probabilitas asymp. sig (2-tailed) > 0,05, maka data mempunyai distribusi normal dan sebaliknya jika probabilitas asymp.sig (2-tailed) < 0,05, maka data mempunyai distribusi yang tidak normal, sehingga keputusan yang dapat diambil, yaitu:

Jika Sig.(p) > 0,05 maka Ho diterima

Jika Sig.(p) < 0,05 maka Ho ditolak

2) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas adalah suatu uji statistik yang digunakan untuk melihat ada tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel independen dalam suatu model regresi linear berganda. Jika ada korelasi yang tinggi diantara variabel-variabel independen, maka hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen menjadi terganggu. Hasilnya adalah bahwa koefisien regresinya tidak tertentu atau kesalahan standarnya tidak terhingga, di mana nilai VIF adalah kurang dari 10 dan nilai tolerance di atas 0,10, maka tidak terdapat gejala multikolinearitas, dan begitu juga sebaliknya.

3) Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas digunakan untuk menguji suatu data statistik yang dapat digunakan untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Uji heterokedastisitas juga dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu observasi ke observasi lain. Uji heterokedastisitas dilakukan dengan meregresikan nilai absolute residual dengan variabel independen. Terdapat atau tidaknya suatu heterokedastisitas, dapat diketahui dengan melihat tingkat signifikan terhadap α 5%.

b. Metode Analisis Diskriptif

1) Membuat Daftar Pengungkapan Sosial

Menurut Glotier dalam Utomo (2000) daftar pengungkapan sosial yang digunakan

adalah dengan mengambil 4 tema, yaitu: kemasyarakatan, ketenagakerjaan, produk dan konsumen, lingkungan hidup.

2) Menentukan Indeks Pengungkapan Sosial

Dalam menentukan indeks terhadap pengungkapan sosial tersebut, untuk setiap sampel perusahaan yang terdapat dalam daftar (*checklist*) pengungkapan sosial dengan cara sebagai berikut:

Nilai 1 = jika perusahaan mengungkapkan item dalam daftar pertanyaan.

Nilai 0 = jika perusahaan tidak mengungkapkan item dalam daftar pertanyaan.

3) Uji Regresi

Uji regresi dilakukan dengan tujuan untuk memprediksi nilai dependen yang ingin diketahui dengan cara menggunakan variabel independen yang nilainya diketahui. Pengujian yang dilakukan dengan menggunakan model regresi linear sederhana, dengan persamaan statistik yang digunakan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X + e$$

Uji regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui interaksi antara *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance*, dan *Good Corporate Governance* sebagai variabel moderating yang diproksikan oleh kepemilikan manajemen, dewan komisaris, dewan direksi, dan komite audit. Untuk *Corporate Social Responsibility* sebagai variabel independen dinotasikan dengan CSR. *Tax Avoidance* sebagai variabel dependen dinotasikan dalam TA. Untuk variabel moderating, proksi kepemilikan manajemen dinotasikan sebagai KEPEM, dewan komisaris dinotasikan dalam DEKOM, dewan direksi dinotasikan dalam DEDIR, komite audit dinotasikan sebagai KOMAD.

Persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$TA = \alpha + \beta_1 CSR + e \quad (1)$$

$$TA = \alpha + \beta_1 CSR + \beta_2 KEPEM + e \quad (2)$$

$$TA = \alpha + \beta_1 CSR + \beta_2 KEPEM + \beta_3 CSR*KEPEM + e \quad (3)$$

$$TA = \alpha + \beta_1 CSR + \beta_2 DEKOM + e \quad (4)$$

$$TA = \alpha + \beta_1 CSR + \beta_2 DEKOM + \beta_3 CSR*DEKOM + e \quad (5)$$

$$TA = \alpha + \beta_1 CSR + \beta_2 KOMAD + e \quad (6)$$

$$TA = \alpha + \beta_1 CSR + \beta_2 KOMAD + \beta_3 CSR*KOMAD + e \quad (7)$$

$$TA = \alpha + \beta_1 CSR + \beta_2 DEDIR + e \quad (8)$$

$$TA = \alpha + \beta_1 CSR + \beta_2 DEDIR + \beta_3 CSR*DEDIR + e \quad (9)$$

Keterangan :

TA = *Tax Avoidance*

CSR = *Corporate Social Responsibility*

KEPEM = Kepemilikan Manajemen

DEKOM = Dewan Komisaris

DEDIR = Dewan Direksi

KOMAD = Komite Audit

α = *Intercept atau Konstanta*

e = *Error Term*, yaitu tingkat kesalahan penduga dalam penelitian

Pengujian hipotesis yang dilakukan dengan menggunakan regresi linier berganda adalah sebagai berikut :

1. Uji t (Uji Parsial), yaitu untuk menguji apakah variabel independen secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen.

Ho Diterima jika $t_{hitung} < t_{table}$ ($\alpha = 0.05$)

Hi Diterima jika $t_{hitung} > t_{table}$ ($\alpha = 0.05$)

2. Uji F (Uji Simultan), yaitu untuk menguji apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.

Ho Diterima jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ ($\alpha = 0.05$)

Hi Diterima jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($\alpha = 0.05$)

Untuk pengolahan data digunakan program komputer *Statistical Package Social Science* (SPSS).

Hasil dan Pembahasan

Deskripsi Variabel Penelitian

Gambaran statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui deskripsi atas variabel-variabel penelitian. Tujuan dari analisis deskriptif adalah untuk mendeskripsikan tentang variabel-variabel penelitian yaitu corporate social responsibility, good corporate governance dan tax avoidance. Berdasarkan nilai masing-masing variabel, akan diketahui deskripsi data yang terdiri atas minimum, maksimum, nilai rata-rata atau *mean* dan standar deviasi. Tabulasi data statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviasi
TAX	115	0,00	1,44	0,31	0,22
KEPEM	115	-23,79	-11,48	-17,30	1,83
DEKOM	115	0,00	1,00	0,98	0,13
DEDIR	114	2,00	15,00	5,63	2,16
KOMAD	115	0,00	1,00	0,97	0,16
CSR	115	6,41	52,56	30,04	9,73

Sumber : data diolah, tahun 2018

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 1 menunjukkan bahwa variabel *tax avoidance* yang diprosikan dengan *effective tax rate* (ETR) memiliki nilai minimum sebesar 0,00 dan nilai maksimum sebesar 1,44, sedangkan nilai rata-rata keseluruhan sebesar 0,31 dengan standar deviasi sebesar 0,22 yang menunjukkan tingkat variasi sebaran data.

Variabel *corporate social responsibility* yang diproksikan dengan *corporate social responsibility index (CSRI)* memiliki nilai minimum sebesar 6,41 dan nilai maksimum sebesar 52,56, sedangkan nilai rata-rata keseluruhan sebesar 30,04 dengan standar deviasi menunjukkan sebaran data sebesar 9,73. Variabel *good corporate governance* yang diproyeksikan dengan kepemilikan manajemen, dewan komisaris, komite audit dan dewan direksi, secara berturut-turut gambaran deskripsi statistiknya sebagai berikut : 1) kepemilikan manajemen memiliki nilai minimum sebesar -23,79 dan nilai maksimum sebesar -11,48, sedangkan nilai rata-rata keseluruhan sebesar -17,30 dengan standar deviasi sebesar 1,83; 2) dewan komisaris memiliki nilai minimum sebesar 0,00 dan nilai maksimum sebesar 1,00, sedangkan nilai rata-rata keseluruhan sebesar 0,98 dengan standar deviasi sebesar 0,13; 3) komite audit memiliki nilai minimum sebesar 0,00 dan nilai maksimum sebesar 1,00, sedangkan nilai rata-rata keseluruhan sebesar 0,97 dengan standar deviasi sebesar 0,16; 4) dewan direksi memiliki nilai minimum sebesar 2,00 dan nilai maksimum sebesar 15,00, sedangkan nilai rata-rata keseluruhan sebesar 5,63 dengan standar deviasi sebesar 2,16.

Uji Asumsi Klasik

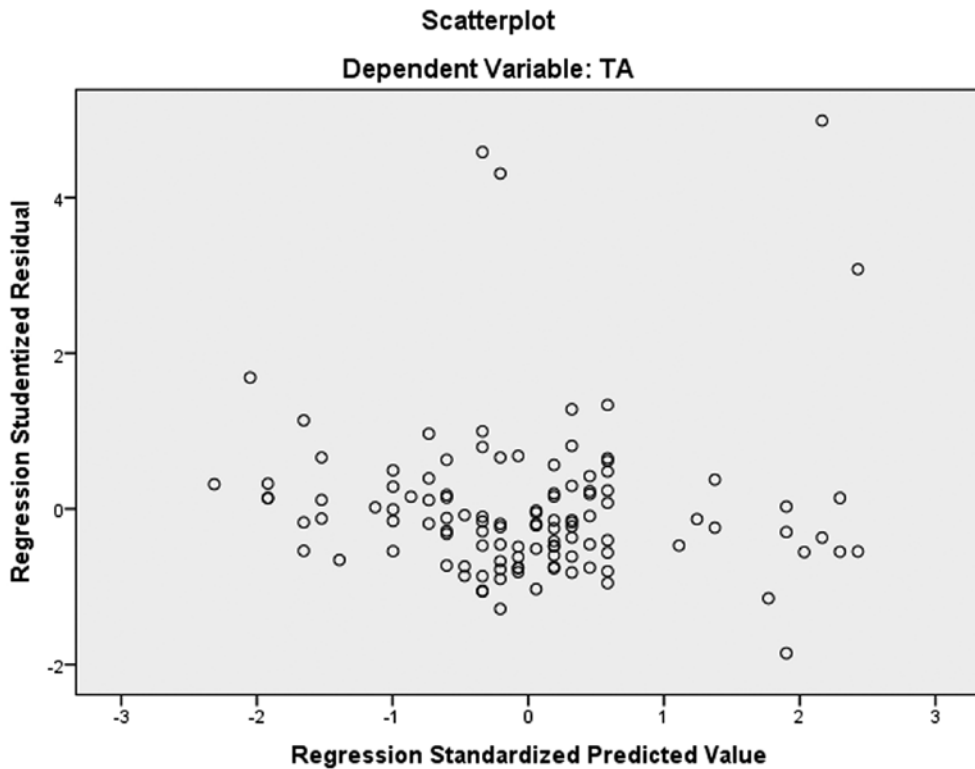
Dalam analisis regresi linier berganda mempunyai beberapa asumsi klasik yang harus dipenuhi agar menghasilkan estimator yang akurat dan mendekati atau sama dengan kenyataan. Asumsi-asumsi dasar tersebut dikenal sebagai asumsi klasik, terdiri atas: tidak terjadi autokorelasi, tidak terjadi heteroskedastisitas, dan tidak terjadi multikolinieritas.

a. Tidak Terjadi Autokorelasi

Untuk mengetahui apakah model persamaan struktural yang dihasilkan tidak terjadi autokorelasi, maka dapat dilakukan uji Durbin-Watson. Dari hasil perhitungan statistik didapatkan nilai Durbin-Watson sebesar 2,004. Nilai Durbin-Watson yang diperoleh untuk persamaan regresi tersebut berada pada kriteria $1,73 \leq D-W \leq 2,27$ berarti model persamaan regresi tidak terjadi autokorelasi.

b. Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

Pengujian gejala heteroskedastisitas dalam persamaan regresi linier berganda dapat diketahui dengan metode Scatterplot. Gejala heteroskedastisitas dapat dideteksi dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada Scatterplot. Hasil uji gejala heteroskedastisitas yang dihasilkan pada penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 1 berikut ini.



Gambar 1. Grafik Scatterplot

Berdasarkan Gambar 1 di atas menunjukkan bahwa tidak ada pola yang jelas, di mana titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga model persamaan yang dihasilkan baik untuk model persamaan regresi dapat disimpulkan tidak terjadi heterokedastisitas.

c. Tidak Terjadi Multikolinieritas

Untuk menguji apakah pada model regresi atau model persamaan struktural terdapat korelasi antar variabel bebasnya dapat dilakukan nilai Variance Inflation Factor (VIF), jika nilai VIF kurang dari 10 maka dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas. Adapun hasil pengujian multikoleniaritas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. Pengujian Multikoleniaritas

Model Regresi	VIF	Nilai toleransi	Keterangan
CSR	1,000	10	Baik

Sumber : Output SPSS, data diolah

Hasil perhitungan nilai *tolerance* menunjukkan bahwa model regresi tidak terjadi multikoleniaritas karena memiliki nilai VIF kurang dari 10.

Pengujian Hipotesis

Pengaruh CSR terhadap Tax Avoidance

Untuk mengetahui pengaruh antara CSR terhadap tax avoidance digunakan analisis regresi linier berganda, dimana hasil output dengan alat bantu program statistik SPSS diperoleh hasil sebagai berikut:

a. Uji Interaksi Regresi Berganda

Hasil uji interaksi regresi berganda pengaruh CSR terhadap Tax Avoidance sebagai berikut:

Tabel 3. Uji Interaksi Regresi Berganda pengaruh CSR terhadap Tax Avoidance

Variabel	b	t hitung	Sig	Keterangan
Konstanta	0,437			
CSR	-0,004	-2,072	0,000	H ₀ ditolak

Sumber : Output Statistik, data diolah

Berdasarkan Tabel 3 hasil perhitungan regresi linier tersebut di atas maka dapat disusun persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$TA = 0,437 - 0,004CSR$$

Dari hasil estimasi regresi yang diperoleh dapat dijelaskan makna koefisien regresi persamaan 1 sebagai berikut :

- 1) $a = 0,437$ menunjukkan nilai konstanta model regresi sebesar 0,437, artinya apabila semua variabel independen dianggap konstan (bernilai 0) maka tax avoidance bernilai sebesar 0,148.
- 2) $b_1 = -0,004$ menunjukkan adanya kenaikan variabel CSR yang dapat mengakibatkan menurunnya Tax Avoidance atau dengan kata lain kenaikan CSR sebesar satu satuan akan menyebabkan menurunnya Tax Avoidance sebesar 0,004satuan.

b. Koefisien Determinasi (R²)

Nilai koefisien determinasi diperoleh nilai sebesar 0,037, hal ini berarti bahwa variabel tax avoidance dapat dijelaskan sebesar 3,7% oleh variabel CSR. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di luar model regresi.

c. F Rasio

Parameter pengujian model regresi pengaruh CSR terhadap tax avoidance dalam penelitian ini dapat dilihat dari perolehan nilai F ratio. Secara statistik diperoleh hasil F hitung sebesar 4,292 dengan signifikansi 0,041 ($P < 0,05$), artinya bahwa model persamaan regresi dapat digunakan untuk memprediksi tax avoidance atau dengan kata lain bahwa model penelitian yang digunakan layak (fit).

d. Uji T Test

Uji secara individu dilakukan dengan menggunakan hipotesis nol tidak ada pengaruh variabel prediktor ke-i terhadap variabel respon dan hipotesis alternatif ada pengaruh variabel prediktor ke-i terhadap variabel respon dengan kriteria

- 1) Apabila tingkat signifikansi $< 0,05$, maka H₀ ditolak atau H_a diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen.

- 2) Apabila tingkat signifikansi > 0,05, maka H₀ diterima Ha Ditolak, artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen.

Pengujian secara statistik diperoleh nilai t hitung sebesar -2,072 dengan signifikansi sebesar 0,041. Nilai Signifikansi CSR yang lebih kecil dari signifikansi yang diharapkan (0,05). maka dapat di ambil keputusan H₀ di tolak dan Ha diterima. hasil tersebut menunjukkan variabel CSR berpengaruh terhadap Tax Avoidance, sehingga hipotesis pertama yang diajukan diterima.

GCG Menjadi Mediasi Hubungan CSR Terhadap Tax Avoidance

Untuk mengetahui peran GCG dalam memediasi hubungan CSR terhadap tax avoidance digunakan analisis regresi linier berganda dengan variabel moderating, dimana hasil output dengan alat bantu program statistik SPSS diperoleh hasil sebagai berikut:

Mediasi Kepemilikan Manajemen Pada Hubungan CSR Terhadap Tax Avoidance

a. Analisis Regresi

Hasil uji interaksi mediasi kepemilikan manajemen pada hubungan CSR terhadap Tax Avoidance sebagai berikut :

Tabel 4. Uji Interaksi mediasi kepemilikan manajemen pada hubungan CSR terhadap Tax Avoidance

Variabel	b	t hitung	Sig	Keterangan
Konstanta	0,423			
CSR	0,000235	0,014	0,989	H ₀ diterima
KEPEM	-0,000188	-0,006	0,995	H ₀ diterima
CSR*KEPEM	0,000234	0,238	0,812	H ₀ diterima

Sumber : Output Statistik, data diolah

Berdasarkan Tabel 4 hasil perhitungan regresi linier tersebut di atas maka dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut:

$$TA = 0,423 + 0,000235CSR - 0,000188KEPEM + 0,000234CSR*KEPEM$$

Dari persamaan regresi tersebut maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Konstanta sebesar 0,423 artinya apabila semua variabel independen dianggap konstan (bernilai 0) maka Tax Avoidance bernilai sebesar 0,423.
- 2) CSR mempunyai koefisien regresi dengan arah positif terhadap *Tax Avoidance* sebesar 0,000235, berarti apabila terjadi peningkatan CSR sebesar 1 satuan maka Tax Avoidance akan mengalami peningkatan sebesar 0,000235, dengan asumsi kepemilikan manajerial dan interaksinya dengan CSR dalam keadaan konstan.
- 3) Kepemilikan manajerial mempunyai koefisien regresi negative terhadap Tax Avoidance sebesar -0,000188, berarti apabila terjadi peningkatan kepemilikan manajemen sebesar 1 satuan maka *Tax Avoidance* akan mengalami penurunan sebesar 0,000188, dengan asumsi CSR dan interaksinya dengan kepemilikan manajerial dalam keadaan konstan.

4) Interaksi CSR dengan kepemilikan manajemen mempunyai koefisien regresi positif sebesar 0,234, berarti peningkatan interaksi CSR dengan kepemilikan manajerial memberikan dampak pada peningkatan Tax Avoidance sebesar 0,234, dengan asumsi CSR dan kepemilikan manajerial dalam keadaan konstan.

b. Uji t test

Hasil pengujian t test diperoleh hasil sebagai berikut:

- 1) Pengujian secara statistik diperoleh nilai t hitung CSR sebesar 0,014 dengan signifikansi sebesar 0,989, maka dapat di ambil keputusan H_0 di terima dan H_a ditolak yang menunjukkan CSR tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance.
- 2) Nilai t hitung KEPEM sebesar -0,006 dengan signifikansi sebesar 0,995, maka dapat di ambil keputusan H_0 diterima dan H_a ditolak yang menunjukkan KEPEM tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance.
- 3) Nilai t hitung CSR*KEPEM sebesar -0,238 dengan signifikansi sebesar 0,812, maka H_0 diterima dan H_a ditolak yang menunjukkan interaksi CSR*KEPEM tidak memberikan pengaruh terhadap Tax Avoidance.

Berdasarkan hasil pengujian t test diketahui bahwa CSR dan KEPEM secara langsung tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance, selain itu interaksi CSR*KEPEM juga tidak memberikan pengaruh terhadap Tax Avoidance. Hasil ini membuktikan bahwa kepemilikan manajerial bukan merupakan variabel yang memediasi hubungan CSR terhadap Tax Avoidance.

Mediasi Dewan Komisaris pada Hubungan CSR terhadap Tax Avoidance

a. Analisis Regresi

Hasil uji interaksi mediasi dewan komisaris pada hubungan CSR terhadap Tax Avoidance sebagai berikut:

Tabel 5. Uji Interaksi Mediasi Dewan Komisaris pada Hubungan CSR terhadap Tax Avoidance

Variabel	B	t hitung	Sig	Keterangan
Konstanta	0,352			
CSR	-0,004686	-0,119	0,906	H_0 diterima
DEKOM	0,087454	0,074	0,941	H_0 diterima
CSR*DEKOM	0,000428	0,011	0,991	H_0 diterima

Sumber : Output Statistik, data diolah

Berdasarkan Tabel 5 hasil perhitungan regresi linier tersebut di atas maka dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut :

$$TA = 0,352 - 0,004686CSR + 0,087454DEKOM + 0,000428CSR*DEKOM$$

Dari persamaan regresi tersebut maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Konstanta sebesar 0,352 artinya apabila semua variabel independen dianggap konstan (bernilai 0) maka Tax Avoidance bernilai sebesar 0,352.
- 2) CSR mempunyai koefisien regresi dengan arah negatif terhadap Tax Avoidance sebesar 0,087454, berarti apabila terjadi peningkatan CSR sebesar 1 satuan maka

Tax Avoidance akan mengalami penurunan sebesar 0,087454, dengan asumsi dewan komisaris dan interaksinya dengan CSR dalam keadaan konstan.

- 3) Dewan komisaris mempunyai koefisien regresi positif terhadap Tax Avoidance sebesar 0,000428, berarti apabila terjadi peningkatan dewan komisaris sebesar 1 satuan maka Tax Avoidance akan mengalami peningkatan sebesar 0,000428, dengan asumsi CSR dan interaksinya dengan dewan komisaris dalam keadaan konstan.
- 4) Interaksi CSR dengan dewan komisaris mempunyai koefisien regresi positif sebesar 0,000428, berarti peningkatan interaksi CSR dengan dewan komisaris memberikan dampak pada peningkatan Tax Avoidance sebesar 0,000428, dengan asumsi CSR dan dewan komisaris dalam keadaan konstan.

b. Uji t test

Hasil pengujian t test diperoleh hasil sebagai berikut :

- 1) Pengujian secara statistik diperoleh nilai t hitung CSR sebesar 0,119 dengan signifikansi sebesar 0,906, maka dapat di ambil keputusan H_0 diterima dan H_a ditolak yang menunjukkan CSR berpengaruh terhadap Tax Avoidance.
- 2) Nilai t hitung DEKOM sebesar 0,074 dengan signifikansi sebesar 0,941, maka dapat di ambil keputusan H_0 diterima dan H_a ditolak yang menunjukkan DEKOM berpengaruh terhadap Tax Avoidance.
- 3) Nilai t hitung CSR*DEKOM sebesar 0,011 dengan signifikansi sebesar 0,991, maka H_0 diterima dan H_a ditolak yang menunjukkan interaksi CSR*DEKOM memberikan pengaruh terhadap Tax Avoidance.

Berdasarkan hasil pengujian t test diketahui bahwa CSR dan DEKOM secara langsung tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance, selain itu interaksi CSR*DEKOM juga tidak memberikan pengaruh terhadap Tax Avoidance. Hasil ini membuktikan bahwa dewan komisaris bukan merupakan variabel yang memediasi hubungan CSR terhadap Tax Avoidance.

Mediasi komite audit pada hubungan CSR terhadap Tax Avoidance

a. Analisis Regresi

Hasil uji interaksi mediasi komite audit pada hubungan CSR terhadap Tax Avoidance sebagai berikut:

Tabel 6. Uji Interaksi Mediasi Komite Audit pada Hubungan CSR terhadap Tax Avoidance

Variabel	B	t hitung	Sig	Keterangan
Konstanta	0,230			
CSR	0,002	0,054	0,957	H_0 diterima
KOMAD	0,208	0,178	0,859	H_0 diterima
CSR*KOMAD	-0,006	-0,164	0,870	H_0 diterima

Sumber: Output Statistik, data diolah

Berdasarkan tabel hasil perhitungan regresi linier tersebut diatas maka dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut :

$$TA = 0,230 + 0,002CSR + 0,208KOMAD - 0,006CSR*KOMAD$$

Dari persamaan regresi tersebut maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Konstanta sebesar 0,230 artinya apabila semua variabel independen dianggap konstan (bernilai 0) maka Tax Avoidance bernilai sebesar 0,230.
- 2) CSR mempunyai koefisien regresi dengan arah positif terhadap Tax Avoidance sebesar 0,002, berarti apabila terjadi peningkatan CSR sebesar 1 satuan maka Tax Avoidance akan mengalami peningkatan sebesar 0,002, dengan asumsi komite audit dan interaksinya dengan CSR dalam keadaan konstan.
- 3) Komite audit mempunyai koefisien regresi positif terhadap Tax Avoidance sebesar 0,208, berarti apabila terjadi peningkatan komite audit sebesar 1 satuan maka Tax Avoidance akan mengalami peningkatan sebesar 0,208, dengan asumsi CSR dan interaksinya dengan komite audit dalam keadaan konstan.
- 4) Interaksi CSR dengan komite audit mempunyai koefisien regresi negatif sebesar -0,006, berarti peningkatan interaksi CSR dengan komite audit memberikan dampak pada penurunan Tax Avoidance sebesar 0,006, dengan asumsi CSR dan komite audit dalam keadaan konstan.

b. Uji t test

Hasil pengujian t test diperoleh hasil sebagai berikut :

- 1) Pengujian secara statistik diperoleh nilai t hitung CSR sebesar 0,054 dengan signifikansi sebesar 0,957, maka dapat di ambil keputusan H_0 di terima dan H_a ditolak yang menunjukkan CSR tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance.
- 2) Nilai t hitung KOMAD sebesar 0,178 dengan signifikansi sebesar 0,859, maka dapat di ambil keputusan H_0 diterima dan H_a ditolak yang menunjukkan KOMAD tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance.
- 3) Nilai t hitung CSR*KOMAD sebesar -0,164 dengan signifikansi sebesar 0,870, maka H_0 diterimadan H_a ditolak yang menunjukkan interaksi CSR*KOMAD tidak memberikan pengaruh terhadap Tax Avoidance.

Berdasarkan hasil pengujian t test diketahui bahwa CSR dan KOMAD secara langsung tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance, selain itu interaksi CSR*KOMAD juga tidak memberikan pengaruh terhadap Tax Avoidance. Hasil ini membuktikan bahwa komite audit bukan merupakan variabel yang memediasi hubungan CSR terhadap Tax Avoidance.

Mediasi dewan direksi pada hubungan CSR terhadap Tax Avoidance

a. Analisis regresi

Hasil uji interaksi mediasi dewan direksi pada hubungan CSR terhadap Tax Avoidance sebagai berikut:

Tabel 7. Uji Interaksi mediasi dewan direksi pada hubungan CSR terhadap Tax Avoidance

Variabel	B	t hitung	Sig	Keterangan
Konstanta	0,717			
CSR	-0,012	-2,615	0,010	H ₀ ditolak
DEDIR	-0,057	-1,737	0,085	H ₀ ditolak
CSR*DEDIR	0,002	1,988	0,049	H ₀ ditolak

Sumber : Output Statistik, data diolah

Berdasarkan Tabel 7 hasil perhitungan regresi linier tersebut di atas maka dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut:

$$TA = 0,717 - 0,012CSR - 0,057DEDIR + 0,002CSR*DEDIR$$

Dari persamaan regresi tersebut maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Konstanta sebesar 0,717 artinya apabila semua variabel independen dianggap konstan (bernilai 0) maka Tax Avoidance bernilai sebesar 0,717.
- 2) CSR mempunyai koefisien regresi dengan arah negative terhadap Tax Avoidance sebesar -0,012, berarti apabila terjadi peningkatan CSR sebesar 1 satuan maka Tax Avoidance akan mengalami penurunan sebesar 0,012, dengan asumsi dewan direksi dan interaksinya dengan CSR dalam keadaan konstan.
- 3) Dewan direksi mempunyai koefisien regresi negative terhadap Tax Avoidance sebesar -0,057, berarti apabila terjadi peningkatan dewan direksi sebesar 1 satuan maka Tax Avoidance akan mengalami penurunan sebesar 0,057, dengan asumsi CSR dan interaksinya dengan dewan direksi dalam keadaan konstan.
- 4) Interaksi CSR dengan dewan direksi mempunyai koefisien regresi positif sebesar 0,002, berarti peningkatan interaksi CSR dengan dewan direksi memberikan dampak pada peningkatan Tax Avoidance sebesar 0,002, dengan asumsi CSR dan dewan direksi dalam keadaan konstan.

b. Uji t test

Hasil pengujian t test diperoleh hasil sebagai berikut :

- 1) Pengujian secara statistik diperoleh nilai t hitung CSR sebesar -2,615 dengan signifikansi sebesar 0,010, maka dapat di ambil keputusan H₀ di tolak dan Ha diterima yang menunjukkan CSR berpengaruh terhadap Tax Avoidance.
- 2) Nilai t hitung DEDIR sebesar -1,737 dengan signifikansi sebesar 0,085, maka dapat di ambil keputusan H₀ ditolak dan Ha diterima yang menunjukkan DEDIR berpengaruh terhadap Tax Avoidance.
- 3) Nilai t hitung CSR*DEDIR sebesar 1,988 dengan signifikansi sebesar 0,049, maka H₀ ditolak dan Ha diterima yang menunjukkan interaksi CSR*DEDIR memberikan pengaruh terhadap Tax Avoidance.

Berdasarkan hasil pengujian t test diketahui bahwa CSR dan DEDIR secara langsung berpengaruh terhadap Tax Avoidance, selain itu interaksi CSR*DEDIR juga memberikan

pengaruh terhadap Tax Avoidance. Hasil ini membuktikan bahwa dewan direksi merupakan variabel yang memediasi hubungan CSR terhadap Tax Avoidance.

Pembahasan

Pengaruh CSR terhadap Tax Avoidance

Hasil pengujian pengaruh corporate social responsibility terhadap tax avoidance secara statistik diperoleh nilai t hitung sebesar -2,072 dengan signifikansi sebesar 0,041, sehingga keputusan H_0 di tolak dan H_a diterima. Hal ini membuktikan bahwa secara statistik corporate social responsibility (CSR) berpengaruh terhadap Tax Avoidance pada perusahaan non keuangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian ini juga menjelaskan bahwa peran CSR perusahaan memberikan dampak yang negatif terhadap Tax Avoidance. Perusahaan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR) secara sukarela atau atas kesadaran dari organ-organ perusahaan mengintegrasikan perhatian dan transparansi terhadap sosial dan lingkungan dalam operasi perusahaan dan interaksi kepada para *stakeholder*-nya. Jika perusahaan melakukan penghindaran pajak, maka reputasi perusahaan akan rusak di masyarakat ataupun *stakeholder*. Sehingga tingkat aktivitas CSR yang tinggi cenderung semakin tinggi pula sikap tanggung jawab yang dimiliki perusahaan dicerminkan dalam sikap patuhnya dalam membayar beban pajak yang telah ditetapkan atau tidak melakukan penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini mendukung teori legitimasi yang menyatakan bahwa perusahaan akan mendapat legitimasi dari masyarakat dengan mengungkapkan aktivitas CSR yang telah dilakukan dan melakukan pembayaran pajak melalui pemerintah dengan jumlah yang telah ditentukan. Hal ini juga mendukung teori *stakeholder* dimana perusahaan tidak hanya bertanggung jawab terhadap kepentingan dalam perusahaan tetapi juga bertanggung jawab terhadap kepentingan seluruh *stakeholder*-nya.

Perusahaan harus memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui aktivitas CSR dan pemerintah melalui pembayaran pajak, sehingga perusahaan dapat bertanggung jawab sosial terhadap seluruh *stakeholder*. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Putri, Zaitul, Herawati (2014) yang menyatakan bahwa tingginya tingkat kesadaran dari perusahaan akan pentingnya pengungkapan informasi sosial perusahaan.

GCG Memediasi Hubungan CSR terhadap Tax Avoidance

Dari keempat pengukuran GCG terbukti secara statistik interaksi dewan direksi dan CSR (CSR, DEDIR) menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,049 lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 dan nilai b (beta) sebesar 0,002, sehingga dewan direksi memperkuat pengaruh CSR terhadap *tax avoidance*. Hal ini berarti bahwa dengan adanya proporsi dewan direksi perusahaan sebagai variabel moderasi dapat memperkuat pengaruh CSR terhadap *tax avoidance*. Perusahaan yang memiliki dewan direksi maka perusahaan tersebut melakukan pengungkapan CSR secara bertanggung jawab dan melakukan praktik *tax avoidance*.

Tata kelola perusahaan membentuk bagaimana fungsi perusahaan di bawah hukum dan norma dalam pembentukan organisasi, penataan, operasi, hubungan, dan akuntabilitas. Ini telah berevolusi dari pemahaman ekonomi dan legalistik yang sempit dari perusahaan menjadi fokus pada keterlibatan pemangku kepentingan dan penatagunaan. Dalam upaya memastikan penciptaan nilai jangka panjang bagi para pemegang saham, bisnis memilih inisiatif, kemampuan, dan hubungan strategis. Dimana hal ini mungkin menguntungkan baik

perusahaan dan masyarakat luas. Sejalan dengan itu, tata kelola perusahaan menghadapi tuntutan regulasi, politik, dan pemangku kepentingan yang semakin meningkat untuk akuntabilitas, etika, transparansi, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), dan pengaruh pemangku kepentingan karena runtuhnya makroekonomi baru-baru ini, pelanggaran manajemen perusahaan yang terlihat, dan kegagalan penatalayanan lingkungan.

Perhatian dewan terhadap hubungan pemangku kepentingan, identifikasi kepentingan bersama, dan penyelarasan kemampuan bisnis berkontribusi terhadap maksimalisasi nilai perusahaan dan ketahanan jangka panjang dalam lingkungan yang tidak pasti. Akuntabilitas dewan sebagai bagian dari strategi, kontrol, dan layanan. Tanggung jawab utama meliputi strategi, penyediaan sumber daya, akuntabilitas fidusia, tata kelola, keterlibatan pemangku kepentingan, dan tanggung jawab sosial. Elemen terakhir menjadi lebih relevan dengan dewan karena perusahaan mencari penciptaan nilai baru melalui inovasi, efisiensi operasional dan penghematan, reputasi dan pengembangan merek, dan diperbaikihubungan pemangku kepentingan. Secara paralel, dewan diperlukan untuk memastikan etika perusahaan, akuntabilitas, keterlibatan pemangku kepentingan, dan penggunaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang jujur dan adil dalam praktik bisnis. Proses keterlibatan pemangku kepentingan dapat menghasilkan manfaat termasuk preferensi, pertumbuhan, laba, dan kesetiaan.

Teori *stakeholder* digunakan untuk memeriksa peran dewan perusahaan, tanggung jawab, dan pengaruh dalam upaya CSR. Ini sesuai sebagai teori stakeholder adalah perspektif utama yang mempengaruhi pemahaman hukum, bisnis, politik, dan sosial saat ini dari perusahaan. Ini menetapkan harapan untuk praktik bisnis, kinerja, dan tata kelola. Ini membentuk standar untuk akuntabilitas dewan, struktur, transparansi, dan keterbukaan. Tanggung jawab sosial perusahaan, tata kelola perusahaan, dan pengaruh kepemimpinan sastra juga dieksplorasi ketika mereka berkembangpemahaman tentang peran dewan dan dampak yang diharapkan.

Teori *stakeholder* memandang korporasi sebagai lokus dari berbagai kepentingan konstituen. Ini mempertimbangkan hubungan antara perusahaan dan setiap individu atau kelompok yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi. Ini memiliki basis deskriptif, normatif, dan etis. Kerangka kerja ini menginformasikan pemeriksaan keterlibatan perusahaan-pemangku kepentingan, identifikasi kepentingan bersama, dan keselarasan kemampuan bisnis untuk mencapaimaksimisasi nilai dan ketahanan jangka panjang dalam lingkungan yang tidak pasti. Hal ini juga meningkatkan harapan untuk kinerja dewan dalam tugas utamanya.

Literatur tata kelola perusahaan mempertimbangkan peran, tanggung jawab, dan penangan dewan. Berkembangnya harapan masyarakat dan hukum telah meningkatkan tuntutan untuk akuntabilitas dan kinerja. Direksi diharapkan untuk menjalankan kepemimpinan, kemandirian, dan penilaian untuk memastikan bahwa perusahaan menciptakan nilai jangka panjang bagi para pemegang sahamnya. Upaya mereka dalam strategi, penyediaan sumber daya, pengawasan, keterlibatan pemangku kepentingan, dan tanggung jawab perusahaan mendorong fokus pada transparansi, praktik etis, dan akuntabilitas. Ini adalah langkah-langkah mendasar untuk mewujudkan penyatuan CSR dan tata kelola perusahaan.

Inti tanggung jawab dewan terletak pada strategi, penyediaan sumber daya, akuntabilitas fidusia, tata kelola, keterlibatan pemangku kepentingan, dan tanggung jawab sosial. Dalam upaya untuk memastikan ketahanan, ia membebani dan menyelaraskan kepentingan

perusahaan dan konstituen untuk memaksimalkan keunggulan kompetitif dan keuntungan bersama. Dewan menyeimbangkan kewajiban pemenuhan fokus pemantauan dan yang dimaksudkan untuk mencapai maksimalisasi kinerja bisnis strategis. Ini melakukan peran yang tampak luar termasuk perumusan strategi dan penilaian risiko, dan kegiatan berwawasan ke dalam seperti pengembangan kebijakan dan pemantauan praktik kepemimpinan. Kontribusi direksi dapat melalui lingkungan, perluasan batas, representasi perusahaan dalam masyarakat, dan penyediaan sumber daya termasuk legitimasi, nasihat, dan akses yang lebih disukai ke organisasi lain. Modal dewan ini meningkatkan arus informasi, efisiensi, dan biaya.

Simpulan dan Saran

Hasil pengujian hipotesis pertama ditemukan bahwa *corporate social responsibility* (CSR) berpengaruh negative terhadap *tax avoidance*. Sehingga perusahaan yang melakukan pengungkapan CSR secara luas, maka perusahaan tersebut tidak melakukan praktik *tax avoidance*. Hasil pengujian hipotesis kedua ditemukan bahwa keberadaan GCG dalam dewan direksi memediasi pengaruh *corporate social responsibility* (CSR) dengan *tax avoidance*. Sehingga keberadaan dewan direksi dapat memberikan kontribusi dalam pengungkapan secaraluas CSR dan praktik *tax avoidance*.

Daftar Pustaka

- Bursa Efek Indonesia. 2014. *Indonesian Capital Market Directory*.
- CSRReview-online.com.2008. *Global Reporting Initiative*.
- Darussalam dan Septriadi, Danny. 2009. *Tax Avoidance, Tax Planning, Tax Evasion, dan Anti Avoidance Rule*. www.ortax.org.
- Fisher, Jasmine M. 2014. *Fairer Shores: Tax Havens, Tax Avoidance, and Corporate Social Responsibility*. J.D. Candidate, Boston University School of Law.
- Global Reporting Initiative. 2000-2006. *Sustainability Reporting Guidelines*.
- Mustika, Ella dan Zaitul dan Yunilma. 2013. *Pengaruh Kepemilikan Perusahaan, Corporate Governance, Leverage Terhadap Tindakan Pajak Agresif Di Indonesia*.
- Maesarah, Yasti dan Atikah, Siti dan Husnaini, Wahidatul. 2015. Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan CSR Terhadap Penghindaran Pajak. *Konferensi Regional Akuntansi (KRA) II Tahun 2015*. Malang.
-Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan *Corporate Governance* (Tata Kelola Perusahaan). *Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI)* Jilid II.
- Putri, Poppy Ayuni dan Zaitul dan Herawati. 2014. Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Pengungkapan CSR Terhadap Tax Avoidance. *E-Journal Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta, Volume 5 No.1 Tahun 2014*.
- Rianse, Usman dan Abdi. 2008. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi Teori dan Aplikasi*. Alfabeta. Bandung.
- Sari, Dewi Kartika dan Martani, Dwi. 2010. *Karakteristik Kepemilikan Perusahaan, Corporate Governance, dan Tindakan Pajak Agresif*. SNA XIII Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*.Website FCGI. www.ici-fcgi.org.

- Winarsih, Rina dan Prasetyono dan Kusufi, Muhammad. 2014. *Pengaruh GCG dan CSR Terhadap Tindakan Pajak Agresif (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Listing di BEI 2009-2012)*. SNA 17 Mataram Lombok.
- Wijaya, Ibnu. 2014. *Mengenal Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)*. www.linkedin.com.
- Zemzem, Ahmed and Ftauhi, Khaoula. 2013. *The Effect of Board of Directors' Characteristics on Tax Aggressiveness*. ISSN 2222-1697 Vo.4, No.4.

